



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**RENCANA KERJA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dapat tersusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2021-2026 yang berjangka lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program, kegiatan-kegiatan, dan subkegiatan-subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indicator outcome yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja ini, tidak lupa kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk lebih menyempurnakan Renja ini. Semoga apa yang telah diberikan mendapat rahmat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pemalang, Juli 2022

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang



MOH. RAMDON, SIP.

Pembina

NIP. 19661228 198702 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pemalang, Juli 2022
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG

MOH. RAMDON, S.IP

Pembina

NIP. 19661228 198702 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
SK BUPATI PEMALANG	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. SistematikaPenulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWAS- AN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Tupoksi PD	21
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	50
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	55
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAT DAERAH	59
BAB V PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 Dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman s/d Tahun 2022	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	21
Tabel 2.3	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	24
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabuapten Pemalang	27
Tabel 2.5	Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	49
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2023	57
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023	60



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050 / 258 / TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

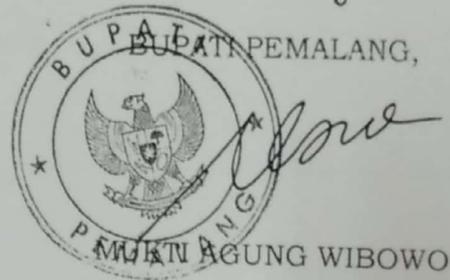
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;
 - b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 Juli 2022



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG.

NOMOR : 050/285/TAHUN2022

TANGGAL :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

No	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bagian Bina Program Dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Anggota	
5.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Anggota	
6.	Kepala Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Anggota	
7.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Anggota	Ratih Hidayati, ST, M.En.
8.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Anggota	Ir. Imam Sulistyio, M.Si
9.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang	Anggota	Arif Rokhman Hakim, ST, MA

10.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Anggota	Urip Basuki, SP
11.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Anggota	Junaedi
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Anggota	Dirjo, SE, M.Si.
13.	Kepala UPT Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Anggota	Dirgono, SIP.
14.	Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Anggota	Guntur Sriwijaya, A.Md.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pemalang dilakukan melalui tahapan yang merupakan suatu proses yang berurutan, mencakup sesuai dengan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Tahap perumusan rancangan Renja;
- b. Tahap penyajian rancangan Renja;
- c. Persiapan penyusunan;
- d. Penyusunan rancangan awal;
- e. Penyusunan rancangan;
- f. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- g. Perumusan rancangan; dan
- h. Penetapan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2023, disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Sedangkan Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang memuat Visi dan Misi Bupati terpilih.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan tek
2. nis urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program dan kegiatan bidang Permukiman dan Kawasan Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tuigas.
3. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman agar penyelenggaraan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

4. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.
5. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemutakhiran informasi publik.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Kabupaten Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36);
18. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Kumuh;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Kunci;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi –Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
38. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Urusan Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 94);
39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor

- 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 80);
40. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 77);
 41. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 73);
 42. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
 43. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan satu tahunan untuk memberikan arah pembangunan dan sinergitas program dan kegiatan, baik yang dilakukan sendiri oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dan yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat untuk menggambarkan capaian kinerja yang dapat dituangkan ke dalam Renja dan RKA PD.

Adapun tujuan penyusunan Renja Disperkim Kabupaten Pemalang ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran informasi mengenai regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;
2. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan permasalahan yang terkait dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan);
3. Memberikan gambaran Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang untuk mencapai target pelayanan pada tahun 2023 dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Sebagai pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) penunjang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 serta pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 2.2. Landasan Hukum
- 3.3. Maksud dan Tujuan
- 4.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang RPJMD 2021-2026.

Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu: "**TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI**".

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, adalah sebagai berikut:

Adil, Keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur, Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis, Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni, Kondisi Kabupaten Pemalang yang adil makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Kabupaten Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. "*Kabupaten Pemalang itu ngangeni*".

Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan

5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

Penyusunan Rencana Strategis Disperkim Kabupaten Pemalang sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang dominan terdapat dalam **Misi keenam** yaitu: **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”**.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup melalui peningkatan cakupan universal akses yaitu peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh. Disamping itu misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang sesuai tata ruang.

Pada tahun 2021 Disperkim Kabupaten Pemalang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.65.893.178.000,- (Enam puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.59.748.857.000,- (Lima puluh Sembilan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 90,68% (Sembilan puluh koma enam puluh delapan persen). Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.5.990.482.000,- (Lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan Renstra Disperkim Pemalang Tahun 2021-2026, Disperkim Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021 melaksanakan 2 Urusan, 7 Program, 19 Kegiatan, dan 62 Sub Kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan Disperkim Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan
 - a) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - c) Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - d) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - e) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - f) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - g) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - h) Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
2. Program Kawasan Permukiman
 - a) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - b) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- c) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas dan Umum
 - 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- 5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - a) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 6. Program Penatagunaan Tanah
 - a) Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Disperkim Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada umumnya dapat terlaksana dengan baik dengan tercapai pelaksanaan pekerjaan fisik 100%, adapun Sub Kegiatan yang tidak bisa tercapai progres 100% adalah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah yaitu pekerjaan Fasilitasi Pembuatan Sertifikat Tanah pada Program DAK Intergrasi di Kelurahan Widuri dan Sugihwaras, dari target sebanyak 212 Sertifikat hanya terealisasi sebanyak 78 Sertifikat.
2. Kendala-kendala yang terjadi telah dapat diupayakan untuk mendapatkan solusi/pemecahan masalah.
3. Hambatan yang dihadapi sebagian besar berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan baik itu berkaitan dengan pihak pengguna maupun dengan penyedia.

Pencapaian target berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun 2021 dan perkiraan capaian target tahun berjalan (2022) dijabarkan dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2021
Dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman s/d Tahun 2022

2 D	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2022/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Th 2021	Realisasi Renja Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+	11=(10/4)
I.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				100 %			100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dok	7 dok	100 %	6 dok	6 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		2 dok	2 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4 dok	4 dok	100 %	4 dok	4 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		2 dok	2 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2022/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun	
				Target Renja Th 2021	Realisasi Renja Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4 dok	4 dok	100 %	4 dok	4 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 dok	12 dok	100 %	12 dok	12 dok	100 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 dok	4 dok	100 %	5 dok	5 dok	100 %
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat				100 %			100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji (bulan)	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100 %	14 bulan	14 bulan	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		2 dok	2 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah laporan keuangan bulan/triwulan/ semester SKPD		4 lap	4 lap	100 %	3 lap	3 lap	100 %
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi		1 lap	1 lap	100 %	1 lap	1 lap	100 %

3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		-	-		4 Keg	4 Keg	100 %
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Bln	12 Bln	100 %			
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		-	-		12 Lap	12 Lap	100 %
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		-	-		2 Dok	2 Dok	100 %
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	100 %			
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai		12 Bulan	12 Bulan	100 %	20 Keg	20 Keg	100 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		12 Bulan	12 Bulan	100 %			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	4 Keg	4 Keg	100 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		-	-		48 Orang	48 Orang	100 %
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	200 Buah	200 Buah	100 %

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang di Sediakan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan/Material yang disediakan		5 Dok	5 Dok	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Dok	1 Dok	100 %			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Dok	1 Dok	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Bulan	12 Bulan	100 %			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		4 Dok	4 Dok	100 %			
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		2 Unit	2 Unit	100 %			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		4 Unit	4 Unit	100 %			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		2 Unit	2 Unit	100 %			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan		2 Unit	2 Unit	100 %			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1 Unit	1 Unit	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %

8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	12 Bulan	100 %	1000 Surat	1000 Surat	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	12 Bulan	100 %	167 Kali	167 Kali	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Bulan	12 Bulan	100 %	10 Buah	10 Buah	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya		12 Bulan	12 Bulan	100 %			
	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara		12 Bulan	12 Bulan	100 %	10 Buah	10 Buah	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang di pelihara		12 Bulan	12 Bulan	100 %			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitas		12 Bulan	12 Bulan	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi		12 Bulan	12 Bulan	100 %			

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi		12 Bulan	12 Bulan	100 %			
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
10.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi								
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Dok	1 Dok	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Calon penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program KaBupaten/Kota Yang Terverifikasi		4 Dok	4 Dok	100 %			
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban								
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme akses perumahan KPR-FLPP		4 Dok	4 Dok	100 %			
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi		10 Rumah	10 Rumah	100 %	15 Rumah	15 Rumah	100 %
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Desain (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		2 Dok	2 Dok	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		-	-		24 Rumah	24 Rumah	100 %

	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau								
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		10 Dok	10 Dok	100 %			
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		2 Lap	2 Lap	100 %			
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Susun Khusus		2 Dok	2 Dok	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang?Pelaku Pembangunan Rumah Untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		4 Rumah	4 Rumah	100 %			
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh		-	-		4 Keg	4 Keg	100 %
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di								
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki		264 Rumah	264 Rumah	100 %			

	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU		512 Rumah	512 Rumah	100 %			
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki		15 Rumah	15 Rumah	100 %	293 Rumah	293 Rumah	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan		1 Paket	1 Paket	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi perumahan yang di sediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian		112 Paket	112 Paket	100 %	26 Paket	26 Paket	100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan		1 Paket	1 Paket	100 %			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								

	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota		2 Dok	2 Dok	100 %	20 Keg	20 Keg	100 %
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1(satu) kabupaten/kota		2 Dok	2 Dok	100 %	35 Keg	35 Keg	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang menyelenggarakan 2 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan. Urusan ini dilaksanakan dengan 7 Program, 19 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan.

Perumusan indikator kinerja utama yang digunakan untuk pengukuran kinerja Disperkim Kabupaten Pemalang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Kunci, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Capaian kinerja pelayanan pada tahun 2021 mengacu pada SPM, IKU dan IKK berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang 2021 – 2026.

Dalam menentukan tolak ukur dan Indikator Kinerja Disperkim, selalu mengacu pada Indikator Kinerja Utama pada RPJMD sebagai indikator yang harus dicapai Bupati, indikator ini digunakan sebagai tujuan dari Kepala Perangkat Daerah (Kepala Dinas) sebagai Indikator Tujuan pada sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kemudian dijabarkan sebagai indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan pada level Eselon III dan Eselon IV.

Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolok ukur kinerja pelayanan Disperkim Kabupaten Pemalang untuk periode lima tahun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2021, serta Renstra Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah : Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Tertangani, Persentase Kawasan Kumuh Tertangani, Persentase Konflik Tanah Garapan Tertangani, dan Persentase Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Terasilitasi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tercantum dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	SPM	IKU	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi tahun		Catatan Analisis
					(n-2) 2021	(n-1) 2022	(n) 2023	(n+1) 2024	(n-2) 2021	(n-1) 2022	(n) 2023	(n+1) 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Persentase Cakupan Wilayah Kumuh di Bawah 10 Ha.			IKK	45,00 %	55,00 %	65,00 %	75,00 %	62,58 %	65,50 %	70,00 %	80,00 %	
2.	Persentase Kawasan Kumuh tertangani		IKU	IKK	1,53 %	1,34 %	1,09 %	0,85%	0,97 %	0,80 %	0,70 %	0,50 %	
3.	Persentase Kawasan Permukiman yang memiliki PSU dalam Kondisi baik.			IKK	30,00 %	33,00 %	36,00 %	39,00%	51,48 %	58,48 %	53,00 %	55,00 %	
4.	Persentase RTLH yang tertangani		IKU	IKK	25,00 %	29,00 %	33,00 %	37,00%	25,51 %	29,00 %	33,00 %	40,00 %	
5.	Persentase berkurangnya RTLH			IKK	75,00 %	71,00 %	67,00 %	63,00%	74,49 %	71,00 %	67,00 %	60,00 %	
6.	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana	SPM		IKK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

7.	Persentase rumah layak huni akibat relokasi/program	SPM		IKK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8.	Persentase konflik tanah Garapan tertangani		IKU	IKK	30,00 %	40,00 %	60,00 %	70,00%	30 %	30 %	60,00 %	70,00 %	
9.	Persentase sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang terfasilitasi		IKU	IKK	60,00 %	65,00 %	75,00 %	85,00%	60,00 %	65,00 %	75,00 %	85,00 %	

2.2.2. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Dalam rangka pelaksanaan pelaporan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Inspektorat telah melakukan evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2021. Tujuan dilakukannya evaluasi tersebut adalah untuk :

- Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

Evaluasi dilakukan melalui 5 Komponen manajemen kinerja, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilakukan Inspektorat, nilai yang didapatkan Disperkim Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	21,12
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	15,00
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	8,98
4.	Evaluasi Internal	10 %	2,46
5.	Capaian Kinerja	20 %	12,25
	Jumlah	100 %	59,81

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari dasar peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan Bupati tentang penjabaran tugas dan fungsi masih dijumpai adanya tumpang tindih kewenangan pelaksanaan tugas/fungsi pada Bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana bidang-bidang tersebut berkaitan dengan penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman Selain berkaitan dengan penjabaran tugas, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas adalah kendala/hambatan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, berkaitan dengan proses peralihan perubahan nomenklatur berakibat pada belum matangnya proses perencanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran juga tidak dapat berjalan optimal.

Dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023, isu-isu penting yang mendasari adalah sebagai berikut :

Isu strategis Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Percepatan Backlog perumahan baik penghunian maupun kepemilikan yang cukup tinggi;
2. Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan pengembangan dan Kawasan Permukiman;
3. Serah Terima akses prasarana sarana utilitas (PSU) Perumahan;
4. Belum tercapainya capaian program pemerintah (Universal access) 100-0-100 yaitu 100 % akses air bersih, 0 % dan Kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi.

Isu strategis Bidang Pertanahan :

1. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Pematang Jaya;
2. Dukungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan BPN dalam percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL (Pendataan Tanah Sistematis Lengkap).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD / Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, maka fungsi dan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya terkait erat dengan pencapaian Misi ke-6 yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pematang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Disperkim	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pertanahan	100 %	24.456.456.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Disperkim	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan	100 %	24.456.456.000	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperkim	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		170.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperkim	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		170.000.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperkim	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dok	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperkim	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dok	25.000.000	

1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dok	10.000.000	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	10.000.000	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	10.000.000	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperkim	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperkim	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	50.000.000	

1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperkim	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Laporan	55.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperkim	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Laporan	55.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperkim	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah		6.021.465.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperkim	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah		6.021.465.000	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperkim	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	14 bulan	5,993,965,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperkim	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	14 bulan	5,993,965,000	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disperkim	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dok	5,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Disperkim	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dok	5,000,000	
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Disperkim	jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dok	5,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Disperkim	jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dok	5,000,000	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperkim	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperkim	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Disperkim	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	5,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Disperkim	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	5,000,000	

2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Disperkim	Jumlah laporan keuangan bulan/triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	12 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Disperkim	Jumlah laporan keuangan bulan/triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	12 Laporan	5,000,000	
2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Disperkim	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	2,500,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Disperkim	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	2,500,000	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperkim	Dukungan terhadap kelancaran administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		39.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperkim	Dukungan terhadap kelancaran administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		39.000.000	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Disperkim	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Disperkim	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,000,000	
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Disperkim	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Disperkim	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,000,000	
3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5,000,000	

3.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperkim	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperkim	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000	
3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	
3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	
3.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Disperkim	Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Disperkim	Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3,000,000	
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Disperkim	Dukungan terhadap kelancaran Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		20.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Disperkim	Dukungan terhadap kelancaran Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		20.000.000	
4.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Disperkim	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Disperkim	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Daerah	1 Dokumen	10.000.000	
4.2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Disperkim	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Disperkim	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000	

4.3	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Disperkim	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	5.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Disperkim	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	5.000.000	
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperkim	Dukungan terhadap kelancaran administrasi kepegawaian perangkat daerah		123.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperkim	Dukungan terhadap kelancaran administrasi kepegawaian perangkat daerah		123.000.000	
5.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Disperkim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Disperkim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.000.000	
5.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Disperkim	jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Disperkim	jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	
5.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disperkim	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai	4 Dokumen	5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disperkim	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai	4 Dokumen	5.000.000	
5.4	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Disperkim	Jumlah Pegawai Pensiun Yang di Pulangkan	1 Orang	3.000.000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Disperkim	Jumlah Pegawai Pensiun Yang di Pulangkan	1 Orang	3.000.000	
5.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disperkim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disperkim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	

5.6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperkim	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	15.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperkim	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	15.000.000	
5.7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperkim	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperkim	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Orang	75.000.000	
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperkim	Dukungan terhadap kelancaran administrasi kepegawaian perangkat daerah		480.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperkim	Dukungan terhadap kelancaran administrasi kepegawaian perangkat daerah		480.000.000	
6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperkim	Jumlah {Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperkim	Jumlah {Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan	1 Paket	15.000.000	
6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperkim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperkim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	1 Paket	50.000.000	
6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperkim	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang di Sediakan	1 Paket	65.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperkim	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang di Sediakan	1 Paket	65.000.000	
6.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperkim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	1 Paket	60.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperkim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	1 Paket	60.000.000	

6.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperkim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperkim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	10.000.000	
6.6	Penyediaan Bahan/Material	Disperkim	Jumlah Paket bahan/Material yang disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Disperkim	Jumlah Paket bahan/Material yang disediakan	1 Paket	50.000.000	
6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperkim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperkim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000	
6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	200.000.000	
6.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disperkim	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disperkim	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000	
6.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disperkim	jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disperkim	jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperkim	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		175.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperkim	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		175.000.000	

7.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperkim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperkim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	50.000.000	
7.2	Pengadaan Mebel	Disperkim	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Disperkim	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit	25.000.000	
7.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	50 Unit	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	50 Unit	25.000.000	
7.4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	4 Unit	25.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	4 Unit	25.000.000	
7.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	25.000.000	
7.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	25.000.000	
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperkim	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17.143.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperkim	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17.143.000.000	
8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	5.000.000	

8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	15.850.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	15.850.000.000	
8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Laporan	50.000.000	
8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.238.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.238.000.000	
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperkim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		285.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperkim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		285.000.000	
9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperkim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperkim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	30.000.000	

9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperkim	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	25 Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperkim	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	25 Unit	30.000.000	
9.3	Pemeliharaan Mebel	Disperkim	jumlah mebel yang dipelihara	50 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Disperkim	jumlah mebel yang dipelihara	50 Unit	15.000.000	
9.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	50 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	50 Unit	50.000.000	
9.5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		jumlah aset tetap lainnya yang di pelihara	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		jumlah aset tetap lainnya yang di pelihara	1 Unit	10.000.000	
9.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitas	2 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitas	2 Unit	50.000.000	
9.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	

9.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1 Unit	50.000.000
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase RTLH yang tertangani	33 %	575.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase RTLH yang tertangani	37 %	575.000.000
10.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		50.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		50.000.000
10.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000
10.2	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen data Calon penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Terverifikasi	1 Dokumen	25.000.000	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen data Calon penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Terverifikasi	1 Dokumen	25.000.000

11.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		50.000.000	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		50.000.000
11.1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Orang	25.000.000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Orang	25.000.000
11.2	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	1 Orang	25.000.000	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	1 Orang	25.000.000
12.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		250.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		250.000.000
12.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	15 Unit Rumah	125.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	15 Unit Rumah	125.000.000

12.2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Desain (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Desain (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000	
12.3	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	50.000.000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	50.000.000	
12.4	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana Kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota yang terbangun	1 Unit Rumah	50.000.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana Kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota yang terbangun	1 Unit Rumah	50.000.000	
13.	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		50.000.000	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		50.000.000	

13.1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	15 Laporan	25.000.000	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	15 Laporan	25.000.000	
13.2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Serah Terima Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	15 Dokumen	25.000.000	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Serah Terima Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	15 Dokumen	25.000.000	
14.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		150.000.000	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		150.000.000	
14.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	50.000.000	
14.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	100.000.000					100.000.000	

15.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Terlaksananya Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan secara Elektronik		25.000.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Terlaksananya Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan secara Elektronik		25.000.000
15.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang?Pelaku Pembangunan Rumah Untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegritas Secara Elektronik	15 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang?Pelaku Pembangunan Rumah Untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegritas Secara Elektronik	15 Dokumen	25.000.000
C.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	1,09 %	1.450.000.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	0,85 %	1.450.000.000
16.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha		50.000.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha		50.000.000
16.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	12 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	12 Laporan	50.000.000

17.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		200.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha ersentase kawasan kumuh		200.000.000	
17.1	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	50.000.000	
17.2	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		Jumlah laporan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	1 Laporan	50.000.000	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		Jumlah laporan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	1 Laporan	50.000.000	
17.3	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	15 Laporan	100.000.000	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	15 Laporan	100.000.000	

18.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani		1.200.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani		1.200.000.000	
18.1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		Jumlah Rencana Tapak Site Plan dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	4 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		Jumlah Rencana Tapak Site Plan dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	4 Dokumen	200.000.000	
18.2	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni		jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	25 Unit Rumah	500.000.000	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni		jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	25 Unit Rumah	500.000.000	
18.3	Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	1 Dokumen	500.000.000	Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	1 Dokumen	500.000.000	
D.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase RTLH yang tertangani	33 %	750.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase RTLH yang tertangani	37 %	750.000.000	

19.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota		750.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota		750.000.000
19.1	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	250 Unit Rumah	750.000.000	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	250 Unit Rumah	750.000.000
E.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam kondisi baik	36,00 %	1.320.540.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam kondisi baik	39,00 %	1.320.540.000
20.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Terlaksananya urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		1.320.540.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Terlaksananya urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		1.320.540.000
20.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	1 Dokumen	20.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	1 Dokumen	20.000.000

20.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi perumahan yang di sediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	15 Lokasi	1.200.540.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi perumahan yang di sediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	15 Lokasi	1.200.540.000	
20.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	10 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	10 Laporan	50.000.000	
20.4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah dokumen kerjasama penyediaan/ pengelolaan PSU perumahan	5 Dokumen	50.000.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah dokumen kerjasama penyediaan/ pengelolaan PSU perumahan	5 Dokumen	50.000.000	
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				200.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				200.000.000	
F.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase tanah garapan yang tertangani	60,00 %	150.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase tanah garapan yang tertangani	70,00 %	150.000.000	
21.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		150.000.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		150.000.000	

21.1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	50.000.000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	50.000.000	
21.2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	4 Berita Acara	100.000.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	4 Berita Acara	100.000.000	
G.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi	75,00 %	50.000.000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi	85,00 %	50.000.000	
22.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah/ Kota		50.000.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah/ Kota		50.000.000	
22.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1(satu) kabupaten/kota	15 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1(satu) kabupaten/kota	15 Laporan	50.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

Dalam hal tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menginventarisasi program dan kegiatan masyarakat melalui melalui kegiatan musrenbang kota dengan langkah-langkah

- 1) Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.
- 2) Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.
- 3) Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan.
- 4) Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan SKPD.
- 5) Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- 6) Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah dilakukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat dalam Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Rangking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kel. Pelutan, Pemaalang	Terbangunnya Jalan Lingkungan/PSU Lingkungan	500 m X 3 mX 15 cm	(Musrenbang) Pengembangan Jalan Rabat Beton
2.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RW 08 Dusun Pandak, Kelurahan Wanarejan Selatan, Taman	Terbangunnya Jalan Lingkungan/PSU Lingkungan	368 mX3m	(Musrenbang) Pembangunan Jalan Lingkungan

BAB III

TUJUAN, SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Terkait pelaksanaan program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang, terdapat dua Kementerian yang terlibat secara langsung dalam urusan bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Arah kebijakan perumahan dan Dan Kawasan Permukiman yang diamanatkan dalam Undang - Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.
2. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan
3. Pembangunan Perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

2. Undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan perumahan dan dan Kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah anatar lain sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan Dan Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa;
- c. teknologi di bidang perumahan dan Dan Kawasan Permukiman;
- d. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Dan Kawasan Permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, Perumahan permukiman, lingkungan hunian, dan Dan Kawasan Permukiman;
- f. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan.
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan Dan Kawasan Permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- h. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
- i. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan Dan Kawasan Permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- j. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- k. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan Dan Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- l. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan Dan Kawasan Permukiman;
- m. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan Dan Kawasan Permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- n. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- o. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- p. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- q. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat diwujudkan melalui pelaksanaan 4 Misi Pembangunan yaitu :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN selama lima tahun ke depan adalah :

Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mencapai visi tersebut, kemampuan lembaga dalam melaksanakan pelayanan publik bidang pertanahan dan ruang difokuskan melalui dua misi yaitu :

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Ruang yang Berstandar Dunia

Misi pertama yaitu: “Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan

yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan”, dijabarkan ke dalam 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Sementara itu, misi kedua adalah “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Ruang yang Berstandar Dunia”, yang diimplementasikan dalam tujuan ke-3 yaitu: “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki peran strategis untuk mendukung tercapainya rancangan tujuh agenda RPJMN ke IV. Oleh karena itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional membutuhkan arah kebijakan yang tepat untuk mendukung tercapainya agenda RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan yang dipilih Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2020-2024 adalah dengan menerapkan paradigma manajemen pertanahan (Land Management Paradigm/LMP) yang terdiri dari Land Tenure, Land Value, Land Use, Land Development dan Cadastre and Land Infrastructure Information sebagai landasan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai Kementerian dalam mendukung RPJMN.

Strategi yang diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Kementerian berbasis LMP adalah penguatan aspek spasial (data bidang tanah terkait kepentingan hak, batasan dan tanggung jawab yang ditimbulkan dari penguasaan, pemilikan, pemanfaatan tanah dan ruang), aspek institusional (mekanisme, prosedur dan proses melibatkan para pihak terkait urusan tanah dan ruang), aspek legal (kebijakan dan peraturan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan Kementerian) dengan pendekatan LMP yang berbasis data dengan cakupan lengkap, memiliki reliabilitas tinggi, dan transparan.

Salah satu ciri menonjol dalam penerapan LMP adalah kepastian informasi terkait bidang tanah. Dalam hal ini proses penyusunan output produk kadaster dan informasi pertanahan perlu disusun secara efisien dan efektif, meniadakan proses redundansi yang tidak perlu dan menutup celah yang ada. Dalam hal ini, peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung pencapaian misi pertama dan kedua melalui digitalisasi proses dan layanan sangat krusial untuk mendukung implementasi kebijakan pertanahan.

5. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Disamping kebijakan nasional pembangunan, perlu kiranya memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan ketersediaan Rumah Layak Huni dan Kawasan Permukiman yang berkualitas, dengan indikator :

1. Persentase (%) rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak
2. Persentase (%) kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum, dengan indikator : Persentase (%) kepastian hukum atas bidang tanah

4. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator Nilai kepuasan masyarakat

Sedangkan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam jangka menengah adalah :

1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan, dengan indikator Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dengan indikator Persentase penurunan kawasan kumuh
3. Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan indikator Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.
5. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dengan indikator Persentase penurunan kawasan kumuh
6. Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan indikator Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
7. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Tujuan dan sasaran Renja Disperkim Kabupaten Pemalang merupakan tindak lanjut dari tujuan dan sasaran Renstra Disperkim Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan Renstra Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang terkait dengan pencapaian misi keenam yaitu **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Kuat Dan Berkesinambungan**. Dengan demikian seluruh kerangka kerja logis urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan mulai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, berikut indikator kinerjanya ditujukan untuk mendukung dan mensukseskan misi keenam tersebut. Tujuan dan sasaran tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa tujuan dan sasaran di tingkat Disperkim Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan cakupan universal akses melalui peningkatan pelayanan peningkatan penanganan kawasan kumuh

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini yaitu :

- 1) Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan
- 2) Meningkatnya penanganan RTLH
- 3) Berkurangnya sengketa tanah garapan
- 4) Meningkatnya sertifikasi kepemilikan hak atas tanah

Dari tujuan dan sasaran tersebut, indikator kinerja Disperkim Kabupaten Pematang Jaya untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pertanahan Tahun 2023 adalah:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra	Target Capaian	Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra
				2020	2023	2026
Meningkatkan cakupan universal akses penanganan kawasan kumuh	Bekurangnya kawasan kumuh perkotaan	Persentase Cakupan wilayah kumuh di bawah 10 ha	%	36,88	65	95
		Persentase kawasan kumuh tertangani	%	1,63	1,09	0,36
		Persentase kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam kondisi baik	%	NA	36	45
	Meningkatnya penanganan RTLH	Persentase RTLH yang tertangani	%	21,67	33	45
	Bekurangnya jumlah Unit RTLH	Persentase RTLH	%	78,33	67	55
		Persentase rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	100
		Persentase rumah layak huni bagi korban/relokasi program	%	100	100	100
	Bekurangnya sengketa tanah garapan	Persentase tanah garapan tertangani	%	NA	60	100
	Meningkatnya sertifikasi kepemilikan hak atas tanah	Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi	%	NA	95	100

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2023 maka diperlukan rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Dalam merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan, antara lain :

- a) Kesenjangan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
- b) Adanya sumber-sumber pendanaan yang akan dipergunakan dalam membiayai pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Secara garis besar Program dan Kegiatan Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan program dan kegiatan dalam kerangka perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, dan bidang pertanahan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan bidang pertanahan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.
2. Jumlah Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 7 (Tujuh) Program dengan 22 (Dua Puluh Dua) Kegiatan, dan 88 (Delapan Puluh Delapan) Sub Kegiatan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 28.752.005.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ribu Rupiah) yang terdiri Belanja Gaji Rp. 5.993.965.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) Belanja Langsung (Non Gaji dan Bantuan Sosial) Rp. 21.258.040.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dan Belanja Sosial Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Disperkim pada tahun 2023 mengajukan Usulan sebanyak 7 (Tujuh) Program dengan 22 (Dua Puluh Dua) Kegiatan, dan 88 (Delapan Puluh Delapan) Sub Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 28.752.005.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ribu Rupiah) yang terdiri Belanja Gaji Rp. 5.993.965.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) Belanja Langsung (Non Gaji dan Bantuan Sosial) Rp. 21.258.040.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dan Belanja Sosial Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Adapun rincian rencana program dan kegiatan beserta indicator, target dan pagu indikatifnya untuk Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							29,052,005,000				30,455,055,500	
1 04 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							24,242,005,000				25,435,055,500	
1 04 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							270,000,000				308,000,000	
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah				4 dokumen		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			67,000,000	
1 04 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD				1 dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	
1 04 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD				4 dokumen		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
1 04 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	
1 04 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	
1 04 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				12 Laporan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
1 04 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				9 Laporan		120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000	
1 04 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,044,505,000				6,055,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan				14 Orang/bulan		6,032,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,040,000,000	
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.04.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD				1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 Laporan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan				1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulan/triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD				12 Laporan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran				1 Dokumen		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								21,000,000				21,000,000	
1.04.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,000,000	
1.04.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.04.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD				1 Laporan 1 Laporan		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,000,000	
1.04.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								15,000,000				17,000,000	
1.04.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Daerah				1 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,000,000	
1.04.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.04.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	

<https://pemalangkab.aipd.kemendagri.go.id/daerah/main?DfHhFEaRhQ2fYD2sbG8CG7EFu7dEekz2m885a9FeNax@CDk8p8THwUNnBaUED63FepDT1S9KdYue63ApuQw3nE4AMFYtAngjOIJkaw7WeKYaT4ET2wDyFjWoL1UYS/QxRBAixZ56U/R1Jv@aRIDyPGFb2/XaNW6z2WdgyKVIcqfBCcFEO08/eTv5Z3h7...> 3/12

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								193,000,000				199,000,500	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 paket		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,000,000	
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai				2 Dokumen		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26,000,000	
1.04.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun Yang di Pulangkan				1 Orang		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,000,000	
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,000,000	
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,000,000	
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				60 Orang		125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125,000,500	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								445,000,000				485,000,000	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan				1 paket		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan				1 paket		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang di Sediakan				12 Bulan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				12 Bulan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				1 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,000,000	
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket bahan/Material yang disediakan				12 Bulan		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,000,000	
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,000,000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			210,000,000	
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								140,000,000				146,505,000	
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan				3 unit		90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,005,000	
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan				1 unit		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				50 unit		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26,000,000	
1.04.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan				5 unit		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,500,000	
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								16,883,500,000				17,921,550,000	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Bulan		15,550,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,555,550,000	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 Laporan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				106 Orang		1,278,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,300,000,000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								230,000,000				282,000,000	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				5 unit		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya				25 unit		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000	
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		jumlah mebel yang dipelihara				1 paket		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,000,000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara				50 unit		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
1.04.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		jumlah aset tetap lainnya yang di pelihara				1 unit		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pematang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi				2 unit		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi				1 unit		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi				1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								585,000,000				650,000,000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								110,000,000				130,000,000	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,000,000	
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen data Calon penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Terverifikasi				1 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								50,000,000				60,000,000	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Orang		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	
1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme akses perumahan KPR-FLPP				1 Orang		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								150,000,000				160,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pematang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terhabilitasi			15 Unit Rumah			125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000	
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1 Dokumen			25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			1 Unit Rumah			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana Kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota yang terbangun		Jumlah Rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana Kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota yang terbangun			1 Unit Rumah			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								50,000,000				60,000,000	
1.04.02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			15 Laporan			25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	
1.04.02.2.04.02	Perutusan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Serah Terima Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			15 Dokumen			25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								175,000,000				185,000,000	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			12 Laporan			100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			105,000,000	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Susun Khusus			12 Laporan			75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000	

<https://pemalangkab.aipd.kemendagri.go.id/daerah/main?D0HIFEoRhQ2FYD2sbG8CQ7EFu7e2kZim885a9FoNax@CDk8p8THwUNBxUED93FepDT1S9KdYua83ApuQw3nE4AMFYtAhpjOUkaw7WeKYaT4ET2wDyFJwL1UYSQxRBaxZ56U/R1Jv@aRIDyPGFb2/XaNw6z2wdgyKVIcqBCcFEO08leTv523h7...> 9/12

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								50,000,000					55,000,000
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Penerimaan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah Untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				15 Rekomendasi		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				55,000,000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								1,125,000,000					1,180,000,000
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								25,000,000					30,000,000
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh				12 Laporan		25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				30,000,000
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								100,000,000					115,000,000
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				60,000,000
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		Jumlah laporan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh				1 Laporan		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh				5 Laporan		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				55,000,000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								1,000,000,000					1,035,000,000
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh		Jumlah Rencana Tapak Site Plan dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh				2 Dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				105,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki				15 Unit Rumah		400,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			410,000,000	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU				5 rumah		500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			520,000,000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								650,000,000				670,000,000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								650,000,000				670,000,000	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki				25 Unit Rumah		650,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			670,000,000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								2,450,000,000				2,520,000,000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								2,450,000,000				2,520,000,000	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan				1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Paket perumahan yang di sediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian				10 paket		2,350,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,400,000,000	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan				10 Laporan		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60,000,000	
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				5 Perumahan		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60,000,000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

<https://pemalangkab.aipd.kemendagri.go.id/daerah/main?DhIFeRrhQ2YD2nbG8CG7EFu7deEku2m885v9FoNax@CD/k8p8ThwUNnBxUE93FepDT1S9K6Yue63ApuQw3nE4AMFYfYAnpOUkww7WeKYt4ET2wDyFJwL1UYs/QxRba/z256U/R1Jv@eRIDyPGFb2/XsNW8z2fwdgyKVtdq/BCeFEO08eTv5Z3h...> 11/12

BAB V

PENUTUP

Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ke-2, berdasarkan Renstra Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan SKPD Tahun

2023.

Renja Disperkim Kabupaten Pemalang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja Kerja tahun lalu. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

- 1) Disperkim Kabupaten Pemalang memiliki 2 (dua) Urusan Wajib yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan.
- 2) Program Kegiatan yang diusulkan lebih diprioritaskan untuk pemulihan perekonomian masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 yang diarahkan pada program-program yang bias menunjang Penuntasan Kemiskinan di Kabupaten Pemalang.
- 3) Perlu disiapkan secara komprehensif pranata hukum sebagai payung dalam pelaksanaan penyaluran bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin serta penanganan kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten.
- 4) Pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan fasilitasi pembangunan perumahan baik rumah susun maupun rumah tinggal biasa dalam rangka pemenuhan backlog perumahan.
- 5) Koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam menentukan kebijakan mekanisme penganggaran dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.

- 6) Menggali potensi pendanaan pelaksanaan kegiatan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) maupun dengan konsep padat karya, atau Kerja Sama Pemerintah Swasta (KSP).
- 7) Koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam menentukan kebijakan mekanisme penganggaran dalam pelaksanaan dan pelayanan bidang pertanahan.

Dengan adanya Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2023 maka penetapan prioritas pembangunan di Kabupaten Pemalang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Pemalang, Juli 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG**



MOH. RAMDON, SIP.
Pembina
NIP. 19661228 198702 1 002